

PENGARUH STRUKTUR *GOVERNANCE* TERHADAP *FEE* AUDIT EKSTERNAL



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

PUTRI DYAH RIZQIASIH

NIM. C2C308019

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

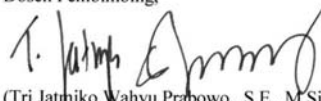
Nama Penyusun : Putri Dyah Rizqiasih
Nomor Induk Mahasiswa : C2C308019
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR *GOVERNANCE*
TERHADAP *FEE* AUDIT EKSTERNAL**

Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu Prabowo., S.E., M.Si., Akt.

Semarang, Agustus 2010

Dosen Pembimbing,



(Tri Jatmiko Wahyu Prabowo., S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 19711026 200003 1 001

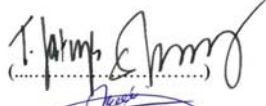
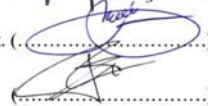
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Putri Dyah Rizqiasih
Nomor Induk Mahasiswa : C2C308019
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR *GOVERNANCE*
TERHADAP *FEE* AUDIT EKSTERNAL**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 Agustus 2010

Tim Penguji

1. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo., S.E., M.Si., Akt. (.....) 
2. Drs. P. Basuki Hadiprayitno, MBA., M.Acc., Akt. (.....) 
3. Surya Rahardja., S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Putri Dyah Rizqiasih, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Struktur *Governance* Terhadap *Fee* Audit Eksternal, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Agustus 2010

Yang membuat pernyataan,

(Putri Dyah Rizqiasih)

NIM : C2C308019

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah : 8)

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of the characteristics of structur governance (board commissioner and audit committee) on audit fees. The existence of the board commissioner and the audit committee as a mechanism of checks and balances is expected to reduce control risk, so low external audit fees can be achieved.

This study is replication of Yatim's et al. research in 2006 and uses secondary data from annual reports of manufacturing companies which listed on Bursa Efek Indonesia in 2006-2008. This study uses purposive sampling method and uses multiple linear regression as the analysis instrument. Before being conducted the regression test, it is examined by using the classical assumption tests.

The results of this study indicate that the size of the board commissioner, the meeting intensity of the board commissioner, the size of the audit committee, and the meeting intensity of the audit committee did not influence the external audit fees. The independency of the board commissioner and the independency of the audit committee have significant positive relationship on the external audit fees. It means that the independency of the board commissioner and the independency of the audit committee will demand a high quality audit from external auditors, resulting in higher audit fees.

Keywords : board commissioner, audit committee, audit fees.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik struktur *governance* (dewan komisaris dan komite audit) terhadap *fee* audit eksternal. Keberadaan dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian diharapkan dapat mengurangi dan mengontrol risiko, sehingga *fee* audit eksternal yang rendah dapat dicapai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yatim *et al.* (2006) dan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan intensitas rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Independensi dewan komisaris dan independensi komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit. Hal tersebut membuktikan bahwa baik dewan komisaris maupun komite audit yang lebih independen akan menuntut kualitas audit yang tinggi dari auditor eksternal, sehingga menyebabkan *fee* audit yang lebih tinggi pula.

Kata kunci : dewan komisaris, komite audit, *fee* audit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT untuk segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan kuliah Program Sarjana di Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro dan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang begitu mendalam untuk :

1. Bapak Tri Jatmiko Wahyu Prabowo., SE., MSi., Akt. selaku dosen pembimbing skripsi untuk ilmu pengetahuan yang ditularkan, perhatian, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan koreksi kepada Penulis.
2. Bapak Drs. P. Basuki Hadiprayitno, MBA., M.Acc., Akt. dan Bapak Surya Rahardja., S.E., M.Si., Akt. untuk koreksi dan masukan yang berharga ketika menjadi penguji dalam sidang akhir skripsi.
3. Bapak Dr. H. M. Chabachib Msi., Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. M. Syafruddin MSi., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang turut memberikan dorongan secara tidak langsung bagi Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Drs. Sudarno MSi., Akt., Ph.D. selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama Penulis menjalani proses belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah membagi ilmu pengetahuan kepada Penulis.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran proses administrasi.

8. Segenap keluarga Penulis yang telah memberikan doa, cinta, dan dukungan yang tidak ada habisnya, terutama untuk Papi, Mami, Rizqi, dan Adhi yang terus menemani baik dalam suka maupun duka.
9. Seluruh sahabat Penulis untuk doa dan dukungan yang diberikan (khususnya untuk Argita Budi M, Christine Ningrum, Novika Astriana, Nila Nur Aini, Shintauli Widya C.T, Vivien Febri A). *My best gfs ever!*
10. Teman-teman seperjuangan (Khoridatul Ulfah, Bayu Fatma, Linggar Pratiwi, Wien Ika, Edu Ardianta) yang telah memberi masukan, bantuan, dukungan serta doa.
11. Segenap teman-teman Akuntansi Program Reguler II Angkatan '08 yang telah memberikan banyak pengalaman yang indah, semangat, bantuan, dan dukungan.
12. Seluruh teman-teman KKN Kemambang 2010 untuk doa dan dukungan yang diberikan.
13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat Penulis sebut satu per satu.

Akhir kata dengan segala keterbukaan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.2 Definisi <i>Corporate Governance</i>	15
2.1.3 Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.4 Manfaat <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.5 Struktur <i>Governance</i>	20
2.1.6 Eksternal Auditor	28
2.1.7 <i>Fee Audit</i>	29
2.1.8 Penelitian Terdahulu	30
2.2 Kerangka Pemikiran	31
2.2.1 Hubungan Antara Struktur <i>Governance</i> dengan <i>Fee Audit</i>	31

2.3	Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	37
3.1.1	Variabel Dependen	37
3.1.2	Variabel Independen	37
3.1.3	Variabel Kontrol	38
3.2	Populasi dan Sampel	43
3.3	Jenis dan Sumber Data	44
3.4	Metode Pengumpulan Data	44
3.5	Metode Analisis	44
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	44
3.5.2	Pengujian Hipotesis	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	51
4.2	Analisis Data	52
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	52
4.2.2	Hasil Pengujian Asumsi Klasik	54
4.2.3	Uji Hipotesis	59
4.3	Interpretasi Hasil	63
BAB V PENUTUP		69
5.1	Simpulan	69
5.2	Keterbatasan	70
5.3	Saran	71
Daftar Pustaka		72
Lampiran-Lampiran		75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Metode Pengambilan Sampel Penelitian.....	51
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif Tahun 2006-2008.....	52
Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	55
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Determinasi	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	60
Tabel 4.8 Uji Signifikansi Parameter Individual / Partial (Uji t)	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Two Tiers System yang diadopsi oleh Indonesia.	24
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	32
Gambar 4.1 Hasil Uji P-Plot of Regression Standardized Residual	54
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Data Mentah Penelitian	76
LAMPIRAN B Hasil Statistik Deskriptif	81
LAMPIRAN C Hasil Uji Normalitas	82
LAMPIRAN D Hasil Uji Multikolonieritas.....	84
LAMPIRAN E Hasil Uji Heterokedastisitas.....	88
LAMPIRAN F Hasil Uji Autokorelasi	89
LAMPIRAN G Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	90
LAMPIRAN H Hasil Uji Statistik F (Simultan)	91
LAMPIRAN I Hasil Uji Statistik t (Partial).....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi agar bertahan hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Untuk mencapai profitabilitas yang tinggi diperlukan pengelolaan perusahaan secara efisien dan efektif. Praktik pengelolaan perusahaan-perusahaan dapat dijelaskan dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan keagenan yaitu suatu kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*". Kontrak kerja sama (*nexus of contract*) ini mengandung arti bahwa di dalam perusahaan terdapat sekumpulan kontrak timbal balik (*quid pro quo contract*) yang memfasilitasi hubungan antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan berbagai partisipan lainnya dengan perusahaan.

Menurut Darmawati *et al.* (2005), inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal/investor*) dan pengendalian (*agent/manajer*). Kepemilikan diwakili oleh investor mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor.

Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki penambahan kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan peningkatan kesejahteraan bagi para manajer. Dengan demikian muncul konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). Pemilik lebih tertarik untuk memaksimumkan *return* dan harga sekuritas dari investasi, sedangkan manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimumkan kompensasi.

Kontrak yang dibuat antara pemilik dengan manajer diharapkan dapat meminimumkan konflik antar kedua kepentingan tersebut. Alijoyo dan Zaini (2004) beranggapan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan pada teori keagenan menciptakan “pengawasan dan pengendalian (*checks and balances*)”, sehingga terjadi independensi yang sehat bagi para manajer untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimum dan *return* yang memadai bagi para pemegang saham.

Teori keagenan merupakan landasan bagi penerapan *corporate governance* sebagai suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi

semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* yang mengandung empat unsur penting seperti yang diuraikan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* yaitu keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor.

Ada empat mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris, yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen. Independensi diharapkan timbul dengan keberadaan komisaris independen. Kompetensi tercipta dengan adanya komite-komite yang dibentuk dewan komisaris, terutama komite audit. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga "*fairness*" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham

mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholder* lainnya.

Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan. Manfaat *corporate governance* akan terlihat dari premium yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Jika ternyata investor bersedia membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* juga akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak menerapkan atau mengungkapkan praktek *good corporate governance* mereka (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Selain komisaris independen, intensitas pertemuan dewan komisaris serta ukuran dewan komisaris (*board size*) turut berperan penting dalam penerapan *good corporate governance*. Beasley (1996) dalam Yatim *et al* (2006) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris secara signifikan mempengaruhi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar pula kemungkinan adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Sebaliknya semakin tinggi intensitas pertemuan dewan komisaris diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam efektivitas fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Dari perspektif auditor, dewan komisaris yang independen, rajin (sering mengadakan pertemuan atau rapat), dan memiliki anggota lebih sedikit diharapkan dapat mengurangi penilaian auditor terhadap

risiko pengendalian serta luasnya prosedur audit sehingga dapat mengurangi *fee* audit.

Untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, dewan komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Komite-komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi/Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan Komite Audit. Berdasar surat keputusan Ketua BAPEPAM KEP 41/PM/2003, SK Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06-2000, Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga, konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Komite audit memegang peranan penting dalam mendampingi dewan komisaris dalam menjalankan tugas serta mengawasi pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko serta fungsi audit internal dan eksternal. Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara pihak eksternal auditor dengan pihak internal auditor termasuk menampung segala masalah yang menyangkut bidang

akuntansi, pengawasan internal, dan bidang auditing. Komite audit juga berfungsi sebagai mediator dalam berkomunikasi antara dewan direksi, akuntan publik dan internal auditor (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004).

The Blue Ribbon Company (1999) merekomendasikan bahwa komite audit yang independen, rajin, dan berjumlah banyak merupakan langkah yang baik untuk mengevaluasi pihak manajemen dan praktik pelaporan keuangan. Hal ini merupakan langkah untuk mendukung perbaikan lingkungan *governance* dalam perusahaan. Hubungan antara komite audit dan auditor eksternal cukup kompleks, baik dalam hal kebutuhan layanan audit oleh klien serta dalam hal ketersediaan layanan audit oleh auditor eksternal (Collier dan Gregory, 1996 dalam Goodwin-Stewart, 2006). Dari sisi permintaan, kehadiran komite audit memiliki hubungan yang positif dengan *fee* audit karena komite audit memastikan bahwa lama proses audit tidak akan dikurangi sampai pada tingkat kualitas audit yang diinginkan (Cadbury Committee, 1992). Dari sisi penawaran, keterlibatan komite audit dalam memperkuat pengendalian internal yang menuntun auditor eksternal mengurangi penilaian dari risiko pengendalian, menghasilkan uji substantif yang lebih sedikit, dan *fee* audit yang lebih rendah (Collier dan Gregory, 1996 dalam Goodwin-Stewart, 2006).

Dalam berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Carcello *et al.* (2002), menggunakan data dari Amerika Serikat pada awal tahun 1990, menemukan bahwa karakteristik komite audit dihubungkan dengan *fee* audit yang lebih tinggi. Sebaliknya, Abbot *et al.* (2003), menggunakan data dari Amerika Serikat, melaporkan pengaruh positif yang signifikan antara

independensi komite audit, keahlian (*expertise*) dan *fee* audit, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara frekuensi pertemuan dan *fee* audit. Sharma (2003) dalam Widiyastuti (2009), menggunakan data dari Australia menemukan pengaruh positif yang signifikan antara *fee* audit dan interaksi antara independensi, ahli akuntansi dan keuangan, serta frekuensi pertemuan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yatim *et al.* (2006) yang menguji pengaruh antara *fee* audit eksternal, dewan komisaris serta karakteristik komite audit. Dengan sampel 736 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2003, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *fee* audit dan independensi dewan komisaris, komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yatim *et al.* (2006) adalah :

- (1) Tahun yang diamati, penelitian ini mengambil tahun 2006 sampai dengan 2008, dengan harapan lebih mencerminkan kondisi saat ini.
- (2) Penelitian memfokuskan penelitian pada sektor manufaktur, karena perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian.
- (3) Penelitian ini sebatas meneliti apakah struktur *governance* (dewan komisaris dan komite audit) yang baik mempengaruhi *fee* audit yang lebih rendah sedangkan variabel keetnisan tidak dipakai karena tidak bisa diterapkan di Indonesia.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian yang sudah ada dan memeriksa pengaruh antara struktur *governance* yang berupa dewan komisaris

dan komite audit terhadap *fee* audit eksternal di Indonesia. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa praktik *good corporate governance* yang baik akan mengurangi risiko pengendalian, sehingga mengarah kepada *fee* audit eksternal yang lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya perlu diteliti tentang PENGARUH KARAKTERISTIK STRUKTUR *GOVERNANCE* TERHADAP *FEE* AUDIT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian berupa hubungan antara berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dan kontribusinya terhadap proses auditing dan *fee* audit, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh independensi dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal?
2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal?
3. Bagaimana pengaruh intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal?
4. Bagaimana pengaruh independensi komite audit terhadap *fee* audit eksternal?
5. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap *fee* audit eksternal?
6. Bagaimana pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *fee* audit eksternal?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh independensi dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal.
2. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal.
3. Pengaruh intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal.
4. Pengaruh independensi komite audit terhadap *fee* audit eksternal.
5. Pengaruh ukuran komite audit terhadap *fee* audit eksternal.
6. Pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *fee* audit eksternal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh struktur *governance* terhadap *fee* audit eksternal. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai karakteristik struktur *governance* apa saja yang berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal, sehingga perusahaan dapat mengontrol dan mengendalikan faktor-faktor yang menentukan besarnya *fee* audit eksternal.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan perusahaan mengenai pentingnya penerapan *good corporate governance*. Dengan

penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Selain itu penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari diadakannya penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan penjelasan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian menjelaskan tentang variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik analisis, dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Merupakan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency theory* merupakan ketidaksamaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Teori ini membahas tentang hubungan keagenan di mana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*).

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Darmawati, dkk. 2004). Pertama, adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan preferensi terhadap risiko.

Manajer seringkali cenderung bertindak untuk mengejar kepentingannya sendiri dan sudah tidak berdasar atas maksimasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan (Jensen dan Meckling, 1976). Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik keagenan. Masalah yang berkaitan dengan perbedaan

kepentingan dalam hal pengambilan keputusan pendanaan antara lain dikarenakan para pemegang saham hanya peduli terhadap risiko sistematis dari saham perusahaan, karena mereka melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Para manajer sebaliknya lebih peduli pada risiko perusahaan secara keseluruhan.

Masalah keagenan tersebut dapat terjadi karena adanya *asymmetric information* antara pemilik dan manajer. Yaitu ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya, *asymmetric information* terdiri dari dua tipe, yang pertama adalah *adverse selection*. Pada tipe ini, pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak akan mau untuk melakukan perjanjian, dia akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi. Tipe yang kedua adalah *moral hazard*. *Moral hazard* ini terjadi kapanpun manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk keuntungan pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik.

Pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost*. Aktivitas pengawasan dapat berupa kontrak perjanjian yang di buat antara prinsipal dan agen. Sedangkan *agency cost* itu sendiri adalah ongkos atau resiko yang terjadi ketika seseorang (*principal*) membayar seseorang (*agent*) untuk menjalankan sebuah tugas, padahal kepentingan *agent* bertentangan atau tidak selaras dengan kepentingan *principal*.

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan ada 3 jenis biaya keagenan. Prinsipal dapat membatasi *divergensi* dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang layak dan dengan mengeluarkan biaya *monitoring* (*monitoring cost*) yang dirancang untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang yang dilakukan oleh agen. Dalam beberapa situasi tertentu, agen memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (*bonding cost*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal. Namun demikian, masih bisa terjadi *divergensi* antara keputusan-keputusan agen dengan keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan agen. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal ini disebut kerugian residual (*residual loss*).

The Cadbury Committee (1992) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan *corporate governance* yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah agensi atau perbedaan kepentingan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* merupakan bentuk pengelolaan perusahaan, yang didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern. Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali investasi dengan wajar, tepat, dan seefisien mungkin,

serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Target kontrol *corporate governance* adalah kontrol terhadap perusahaan yang diarahkan pada pengawasan perilaku manajer. Kontrol tidak diarahkan pada pengekangan kreatifitas dan potensi manajemen, tetapi lebih diarahkan pada upaya mengarahkan pengelolaan perusahaan yang terbuka (*transparent*) dan yang bisa dipertanggungjawabkan (*accountable*) serta terdapat proses *monitoring*.

2.1.2 Definisi Corporate Governance

Berdasarkan definisi oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* yang sesuai dengan definisi *Cadbury Committee*, *corporate governance* didefinisikan sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Center for European Policy Studies (CEPS) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dalam definisi ini, hak merupakan hak seluruh *stakeholders* untuk mempengaruhi manajemen. Proses, merupakan mekanisme dari hak-hak *stakeholders* serta pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar kegiatan perusahaan. *Asian Development Bank (ADB)* menjelaskan bahwa *corporate governance*

mengandung empat nilai utama yaitu, *accountability*, *transparency*, *predictability*, serta *participation*.

Sedangkan menurut Komisi Nasional GCG Indonesia, *good corporate governance* merupakan pola hubungan, sistem, serta proses yang digunakan organ perusahaan (direksi, komisaris) guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Pola hubungan, sistem, serta proses itu sendiri berjalan berdasarkan lima prinsip, yaitu transparansi, independensi, *fairness*, akuntabilitas dan tanggung jawab.

Dari beberapa pengertian di atas, beberapa aspek penting dari *corporate governance* meliputi :

- a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan, diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi, yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
- b. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders*, yang meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal).
- c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan dan hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan

perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

2.1.3 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

menguraikan empat prinsip dalam *corporate governance*, yaitu :

- a. *Fairness* (keadilan)

Fairness menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Prinsip *fairness* diharapkan untuk membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*) sehingga terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Penegakan prinsip *fairness* mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.

- b. *Transparency* (transparansi)

Transparency mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip *transparency*

diharapkan dapat membantu *stakeholders* dalam menilai risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan serta meminimalisasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

c. *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip *accountability* menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Beberapa bentuk implementasi dari prinsip *accountability* adalah adanya praktek audit internal yang efektif serta kejelasan fungsi, hak, dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan *Statement of Corporate Intent* (target pencapaian perusahaan di masa depan). Apabila prinsip *accountability* diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi.

d. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Responsibility memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung masyarakat.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menerjemahkan prinsip-prinsip di atas kedalam lima aspek sebagai pedoman

pengembangan kerangka kerja legal, institusional, dan *regulatory* bagi *corporate governance* di suatu negara. Lima aspek tersebut meliputi :

- a. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan.

Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.

- b. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham.

Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara dan diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.

- c. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*.

Hak-hak *stakeholders* harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan kerjasama aktif antara perusahaan dan para *stakeholders* harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan.

- d. Transparansi dan pengungkapan (*disclosure*).

Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* perusahaan.

- e. Peranan dan tanggung jawab pengurus perusahaan (*corporate boards*).

Pengawasan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

2.1.4 Manfaat *Corporate Governance*

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, mekanisme *corporate governance* juga dapat membawa beberapa manfaat, antara lain :

- a. Mengurangi *agency cost*, yang merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*) sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- c. Menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

2.1.5 Struktur *Governance*

Perwujudan *good corporate governance*, dimulai dengan struktur *governance*. Berasal dari kata *gubernare*, *governance* berarti mengendalikan, memberi arahan, layaknya seorang nahkoda kapal. Dengan kata lain siapapun yang menjadi pelaku dalam struktur *governance*, adalah seorang atau badan yang mampu memberikan arahan dan mengendalikan perusahaan agar tetap dikelola

berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006).

Syakhroza (2003) menyatakan bahwa struktur *governance* adalah suatu kerangka di dalam organisasi mengenai bagaimana prinsip *governance* bisa dibagi, dijalankan, serta dikendalikan. Struktur *governance* didesain sedemikian rupa agar mampu mendukung berjalannya aktivitas organisasi perusahaan secara bertanggung jawab dan terkendali. Dengan kata lain struktur *governance* harus mampu mendukung tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Menurut Iskander & Chamlou (2000) dalam Lastanti (2005), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *external mechanisms*. *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.

Mekanisme atau struktur yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada mekanisme internal seperti yang disebutkan oleh Iskander & Chamlou (2000) dalam Lastanti (2005). Mekanisme tersebut akan dijelaskan dalam sub-sub bab berikut.

2.1.5.1 Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Berkenaan dengan bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu *Anglo Saxon* dan *Kontinental Eropa*. Sistem Hukum *Anglo Saxon* mempunyai Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*. Di sini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Pada dasarnya yang disebut belakangan ini diangkat karena kebijakannya, pengalamannya dan relasinya. Negara-negara dengan *One Tier System* misalnya Amerika Serikat dan Inggris.

Sistem Hukum *Kontinental Eropa* mempunyai Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*. Di sini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Yang disebutkan terakhir, yaitu dewan direksi, mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris.

Dalam sistem ini, anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Sehingga dewan komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara-negara dengan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, maka hukum perusahaan Indonesia menganut *Two Tiers System* untuk struktur dewan dalam perusahaan.

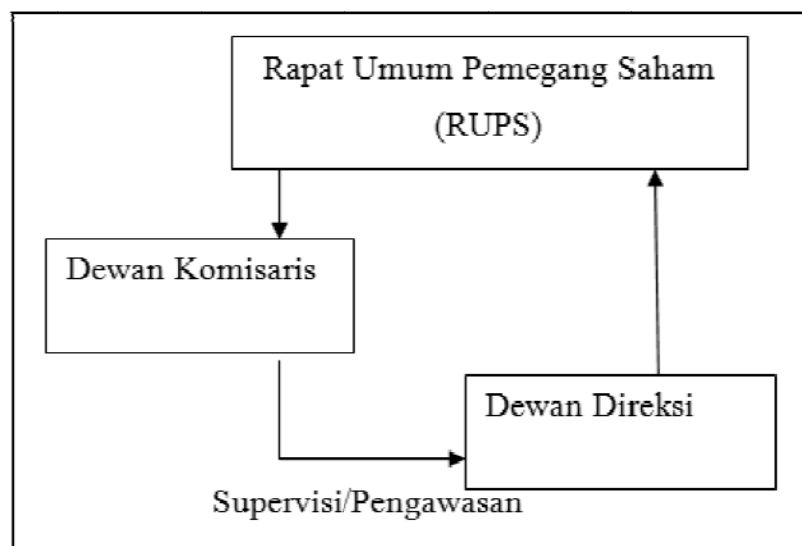
Dalam *Two Tiers System*, struktur kepemimpinan dewan yang independen jelas sangat efektif dalam menghadapi *agency problem* karena adanya pemisahan dalam hal kebijakan bidang manajemen dengan kebijakan bidang pengawasan. Di dalam *Two Tiers System* dewan pelaksana pada waktu yang bersamaan tidak boleh merangkap menjadi *chairman* pada dewan pengawas perusahaan. Dengan demikian fungsi dan peranan yang mandiri dari dewan pengawas dalam *Two Tiers System* ini sangat efektif dalam menghindari resiko terjadinya penyimpangan.

Pada *Two Tiers System* semua komite diciptakan sebagai wahana penyeimbang bagi perusahaan untuk menjamin perusahaan dapat dikelola secara baik, efektif, dan profesional. Selain komite-komite yang ada didalam perusahaan struktur dewan komisaris juga dapat mempengaruhi kinerja dewan komisaris.

Struktur *governance* di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Fungsi pengambil kebijakan dijalankan oleh dewan direksi, sedangkan fungsi pengawasan dijalankan oleh dewan komisaris. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara

kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai (*values*) perusahaan.

Gambar 2.1 Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam *Two Tiers System* yang diadopsi oleh Indonesia.



(Sumber: *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000)

2.1.5.2 Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Dinyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30 % dari seluruh anggota dewan komisaris. Beberapa kriteria tentang komisaris independen adalah sebagai berikut (BEJ, 2000) :

- a. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Komisaris independen tingkat kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- e. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sedangkan kriteria komisaris independen menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (2000) antara lain :

- a. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
- b. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan.
- c. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.

- d. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- f. Komisaris independen tidak memiliki kontrak kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
- g. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

2.1.5.3 Komite Audit

Konsep komite audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, *New York Stock Exchange* (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan, sejak itu banyak negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002 (Toha, 2004).

Baridwan dalam Toha (2004) mendefinisikan komite audit sebagai “Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan untuk membantu dewan

komisaris perusahaan melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan, mengelola perusahaan serta melaksanakan fungsi penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independen.”

Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE- 03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk (1) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (2) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (3) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (4) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/pengawasan.

Tujuan dibentuknya komite audit meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas penyusunan laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab atas audit eksternal laporan keuangan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal.

b. Manajemen Risiko dan Kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol.

c. *Corporate Governance*

Meskipun direksi dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *corporate governance*, namun komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*.

2.1.6 Eksternal Auditor

Eksternal auditor adalah profesi audit yang melakukan audit atas laporan keuangan dari perusahaan, pemerintah, individu atau organisasi lainnya. Eksternal auditor ini mempunyai independensi dari perusahaan yang diaudit. Pengguna dari informasi keuangan perusahaan, seperti investor, agen pemerintah dan umum bergantung pada eksternal auditor untuk menghasilkan informasi yang tidak bias dan independensi.

Eksternal berbeda dengan internal auditor : 1) tanggung jawab utama internal auditor adalah menilai strategi dan praktek manajemen risiko perusahaan, kerangka kerja pengendalian manajemen (termasuk teknologi informasinya), dan proses *governance*, 2) internal auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan.

Peran utama eksternal auditor adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Secara normal, eksternal auditor

mereview prosedur pengendalian teknologi informasi saat menilai pengendalian internal keseluruhan.

2.1.7 Fee Audit

DeAngelo dalam Halim (2005) menyatakan bahwa *fee* audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit.

Simunic (2006) menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit (atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, *D/E*, *litigation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foreign listed*). Sedangkan menurut Sankaraguruswamy *et al.* dalam Halim (2005) *fee* audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, keuangan klien (*financial of client*), ukuran perusahaan klien (*client size*), ukuran auditor atau KAP, keahlian yang dimiliki auditor tentang industri (*industry expertise*), serta efisiensi yang dimiliki auditor (*technological efficiency of auditors*).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Yatim *et al.* dalam “*Governance Structures, Ethnicity and Audit Fees of Malaysian Listed Firms*” menguji pengaruh antara *fee* audit eksternal, dewan komisaris serta karakteristik komite audit. Dengan sampel 736 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2003, peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *fee* audit dan independensi dewan komisaris, komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara *fee* audit dan perusahaan yang dimiliki oleh pribumi (bumiputera).

Carcello *et al.* (2000) dalam “*Board Characteristics and Audit Fees*” menguji pengaruh antara karakteristik dewan dalam perusahaan dengan *fee* yang dibayarkan untuk auditor eksternal. Penelitian ini menggunakan sampel dari *Fortune 1000 Companies* dan menggunakan analisis OLS untuk menguji hipotesisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan positif antara *board independence, diligence and expertise* dan *fee audit*.

Goodwin-Stewart dan Kent (2006) dalam “*Relation Between External Audit Fees, Audit Committee Characteristics and Internal Audit*” menguji hubungan keberadaan komite audit, karakteristik komite audit dan fungsi audit internal terhadap kenaikan *fee* audit eksternal. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Australian Stock Exchange* (ASX) pada tahun 2000 dan menggunakan analisis OLS untuk menguji hipotesisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit, pertemuan komite audit serta peningkatan fungsi audit internal berhubungan dengan kenaikan *fee* audit.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Antara Struktur *Governance* dengan *Fee Audit*

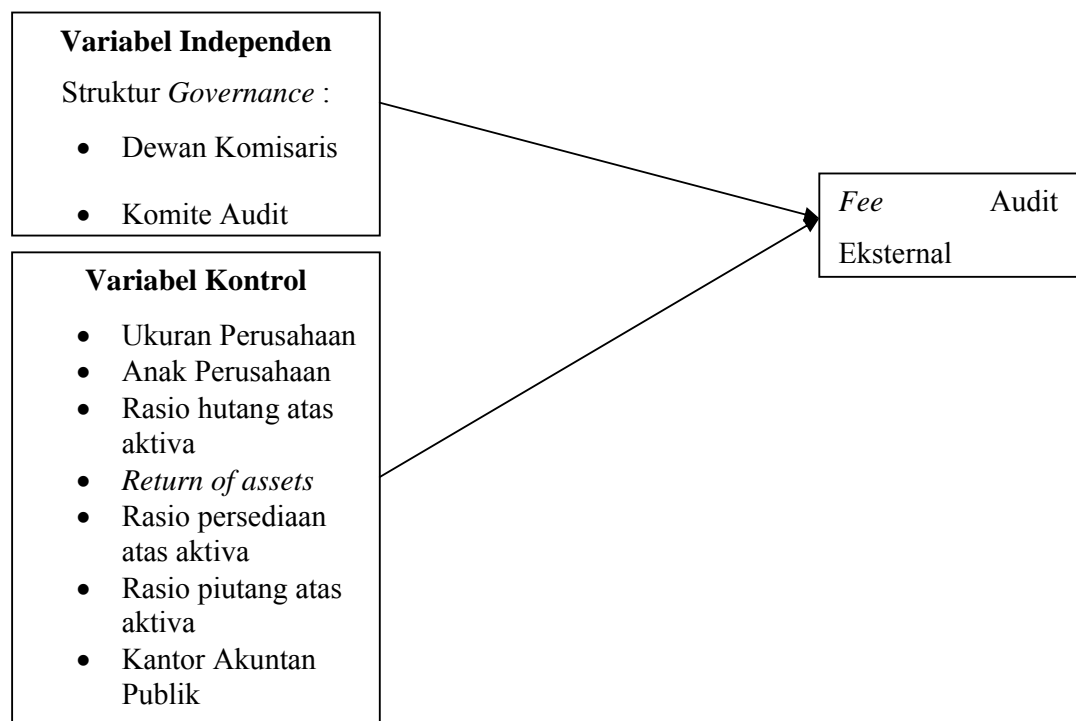
Struktur *corporate governance* dalam penelitian ini mencakup dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris sebagai wakil dari pemegang saham, mempunyai kekuasaan yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi perilaku oportunistik manajemen dalam pelaporan keuangan (Fama dan Jensen, 1993). Dengan demikian struktur *governance* yang baik cenderung akan mengurangi dan mengontrol risiko sehingga mengarah kepada *fee* audit eksternal yang rendah.

Sedangkan *The Blue Ribbon Committee* (1999) merekomendasikan bahwa komite audit yang *independent, diligent, expert* dan berjumlah banyak

merupakan langkah yang baik untuk mengevaluasi pihak manajemen dan praktik pelaporan keuangan. Hal ini merupakan langkah untuk mendukung perbaikan lingkungan *governance* dan mengurangi *fee* audit eksternal.

Dalam penelitian ini, selain menggunakan variabel dependen dan variabel independen juga digunakan variabel kontrol sebagai pengontrol variabel independen untuk dapat menjelaskan keberadaan variabel dependen. Variabel tersebut digunakan sebagai pengontrol risiko serta untuk mengembangkan *baseline* model atau model dasar bagi *fee* audit sebagaimana digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan tujuh variabel kontrol yang berhubungan dengan *fee* audit antara lain ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, rasio hutang atas aktiva perusahaan, *return of assets*, rasio persediaan dan piutang atas aktiva perusahaan, dan Kantor Akuntan Publik yang digunakan.

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian



2.3 Hipotesis

Corporate governance secara khas diimplementasikan melalui dewan komisaris dan direksi. Komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen mempunyai tanggung jawab utama untuk mengawasi kinerja manajemen. Sebagai bagian dari pengendalian lingkungan, tanggung jawab dewan komisaris juga mencakup pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan meningkatkan pengendalian yang berhubungan dengan risiko strategi kunci.

Dewan komisaris yang independen akan melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reliabilitas dan validitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai (Beasley, 1996; Dechow *et al.*, 1996). Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor yang mengarah kepada *fee* audit yang lebih rendah.

H1 = Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

Lipton dan Lorsch (1992) dan Jensen (1993) dalam Yatim *et al.* (2006) berpendapat bahwa terdapat kesulitan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasi dewan komisaris yang berjumlah banyak. Beasley (1996) dalam Yatim *et al.* (2006) menemukan bahwa jumlah dari dewan komisaris secara signifikan mempengaruhi kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Hasil penelitiannya mengindikasikan jika jumlah dewan komisaris meningkat, kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan juga meningkat. Apabila jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh dalam proses pelaporan keuangan maka hal tersebut mempengaruhi proses audit juga. Jika dewan komisaris yang

berjumlah banyak kurang efektif dalam hal pengawasan pelaporan keuangan (Beasley, 1996), maka eksternal auditor perusahaan menaksir pengendalian lingkungan sangat lemah, sehingga waktu audit yang dibutuhkan lebih lama yang berakibat pada tingginya *fee* audit eksternal.

H2 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *fee* audit eksternal.

Intensitas pertemuan dewan komisaris juga memiliki kontribusi dalam keefektifan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan. Lipton dan Lorsch (1992) dan Byrne (1996) dalam Yatim *et al.* (2006) berpendapat bahwa dewan komisaris yang sering bertemu akan melakukan kewajibannya dengan rajin dan tentunya bermanfaat bagi *shareholders*. Conger *et al.* (1998) dan Vafeas (1999) dalam Yatim *et al.* (2006) berpendapat bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris. Dewan komisaris yang rajin (diukur dengan jumlah rapat yang diadakan selama tahun keuangan) akan berhubungan negatif dengan *fee* audit eksternal.

Yatim *et al.* (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris yang lebih independen, memiliki anggota lebih sedikit, dan sering mengadakan rapat akan menambah fungsi internal *governance* dan *environment control* serta mengurangi penilaian risiko oleh auditor terhadap proses pelaporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap *fee* audit yang lebih rendah.

H3 = Intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

The Blue Ribbon Committee (1999) merekomendasikan bahwa komite audit yang lebih independen, memiliki anggota lebih banyak, dan sering mengadakan rapat diharapkan akan meningkatkan pengawasan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan. Penelitian ini menguji apakah perusahaan yang memiliki komite audit sesuai dengan yang direkomendasikan oleh *The Blue Ribbon Company* akan dihubungkan dengan kualitas pelaporan keuangan yang tinggi, yang berakibat pada rendahnya penilaian auditor terhadap risiko pengendalian, sehingga *fee* audit eksternal yang rendah dapat tercapai.

Konsisten dengan pendekatan berbasis risiko untuk jasa audit (praktik tata kelola perusahaan yang baik akan menurunkan *fee* audit eksternal), suatu komite audit yang independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses pelaporan keuangan sehingga mengurangi timbulnya masalah dalam pelaporan keuangan (Blue Ribbon Committee, 1999; Abbott *et al.*, 2004; Dechow *et al.*, 1996). Komite audit yang independen akan lebih baik dalam hal perlindungan reliabilitas proses akuntansi dan memajukan objektivitas dari komite audit. Hal ini akan memperkuat pengendalian internal dan mengarah kepada berkurangnya risiko pengendalian. Oleh karena itu pengujian substantif dapat dikurangi sehingga diharapkan dapat memperkecil *fee* audit.

H4 = Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

Braoitta (2000) dalam Yatim *et al.* (2006) menyatakan bahwa rekomendasi jumlah komite audit konsisten dengan keinginan untuk meningkatkan status organisasi komite audit. Sesuai dengan rekomendasi dari The Blue Ribbon

Company (1999), penelitian ini berpendapat bahwa komite audit yang lebih besar akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berakibat pada rendahnya *fee* audit eksternal.

H5 = Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

Penelitian sebelumnya juga menyarankan bahwa komite audit yang lebih sering bertemu dapat mengurangi timbulnya masalah pelaporan keuangan. Dengan mengadakan pertemuan dan berkomunikasi lebih sering dengan eksternal auditor, komite audit dapat memperingatkan auditor pada masalah tertentu yang membutuhkan perhatian lebih dari auditor (Raghunandan *et al.*, 1998). Konsisten dengan pendekatan berbasis risiko atas jasa audit maka komite audit yang lebih sering bertemu diharapkan akan mengurangi masalah pelaporan keuangan yang mengarah kepada *fee* audit eksternal yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, struktur komite audit yang sesuai dengan rekomendasi The Blue Ribbon Committee (1999) akan memperkuat efektivitas komite audit dalam fungsi pengawasan. Hal ini akan mengurangi pengujian substantif yang mengarah kepada *fee* audit eksternal yang lebih rendah.

H6 = Intensitas pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fee* audit. Data tentang *fee* audit akan diwakili oleh akun *professional fees* yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang selanjutnya variabel akan diukur dengan menggunakan *logaritma natural* dari *professional fees*. Dasar pengambilan keputusan ini adalah belum tersedianya data tentang *fee* audit dikarenakan pengungkapan data tentang *fee* audit di Indonesia masih berupa *voluntary disclosures*, sehingga belum banyak perusahaan yang mencantumkan data tersebut di dalam *annual report*. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan LNFEE di dalam persamaan.

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Dewan Komisaris

Komisaris independen dipandang dapat melakukan pengawasan secara signifikan terhadap kegiatan dan pengendalian dalam perusahaan sehingga memerlukan informasi yang independen yang berasal dari auditor eksternal (Hay, 2008). Variabel akan dihitung dengan ketentuan bahwa dewan komisaris memiliki komisaris independen, memiliki anggota sedikit, dan sering mengadakan rapat.

Selanjutnya komisaris independen diukur melalui jumlah total komisaris independen yang ada dalam dewan komisaris dan akan dilambangkan dengan BoardInd, jumlah anggota diukur melalui jumlah total dewan komisaris yang ada pada perusahaan dan dilambangkan dengan BoardSize, dan jumlah rapat diukur melalui jumlah total rapat yang dilakukan dewan komisaris selama periode akuntansi dan dilambangkan dengan BoardMeet.

3.1.2.2 Komite Audit

Hay *et al.* (2008) dalam Widiyari (2009) menyatakan bahwa komite audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan serta sebagai penengah antara auditor internal dan eksternal. Variabel akan dihitung dengan ketentuan bahwa komite audit memiliki komisaris independen, memiliki anggota banyak, serta sering mengadakan rapat. Selanjutnya komite audit yang independen diukur melalui jumlah total komisaris independen yang ada dalam komite audit dan dilambangkan dengan ACInd, jumlah anggota diukur melalui jumlah total komite audit yang ada pada perusahaan dan dilambangkan dengan ACSIZE, dan jumlah rapat diukur melalui jumlah total rapat yang dilakukan komite audit selama periode akuntansi dan dilambangkan dengan ACMMeet.

3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol sebagai pengontrol variabel independen untuk dapat menjelaskan keberadaan variabel dependen, serta untuk mengembangkan *baseline model* atau model dasar bagi *fee* audit sebagaimana digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dasar keputusan pemakaian

variabel kontrol adalah untuk menghindari adanya unsur bias hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian dengan menggunakan variabel kontrol akan meminimalisasi bias dibandingkan dengan penelitian tanpa menggunakan variabel kontrol. Variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Variabel indikator untuk mewakili faktor ukuran perusahaan adalah total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Hay *et al.*, 2008 dalam Widiyarsari, 2009). Variabel ini akan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan LNASSETS didalam persamaan.

3.1.3.2 Anak Perusahaan

Anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit (Hay *et al.*, 2008 dalam Widiyarsari, 2009). Menurut Beams dalam Halim (2005), apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di dalam negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi. Selain itu, apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di luar negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit

karena perlu membuat laporan *reasurement* dan atau membuat laporan transaksi yang kemudian membuat laporan konsolidasinya. Variabel akan diukur dengan menggunakan akar pangkat dua dari jumlah total anak perusahaan. Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan SUBS.

3.1.3.3 Rasio Utang atas Aset Perusahaan

Variabel ini merupakan rasio untuk mengukur likuiditas seluruh utang-utang jangka panjang perusahaan atas seluruh aset perusahaan. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan LEV dalam persamaan.

Rumus :

$$LEV = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

Pengertian :

- Utang jangka panjang merupakan utang jangka panjang perusahaan yang dapat dilunasi beberapa waktu (tahun) lagi.
- Total aset merupakan total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud.

3.1.3.4 Return of Assets

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dengan ROA tinggi akan membayar *fee* yang lebih rendah dengan tetap konsisten dengan *auditor-client risk sharing* (Crasswell dan Francis dalam Halim, 2005). ROA merupakan rasio untuk mengukur *turnover* aset atas investasi yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya variabel akan dilambangkan dengan ROA dalam persamaan.

Rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Pendapatan operasional setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Pengertian :

- Pendapatan merupakan laba usaha perusahaan yang diperoleh dari transaksi utama perusahaan.
- Total aset merupakan total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud.

3.1.3.5 Rasio Persediaan dan Piutang atas Aset Perusahaan

Aset tertentu dipandang lebih beresiko ketika diaudit dan menyebabkan *fee* audit yang lebih tinggi. Simunic (1980) menyatakan bahwa persediaan dan piutang merupakan akun yang lebih sulit diaudit daripada akun yang lain. Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan INV dan REC dalam persamaan.

Rumus :

$$\text{INV} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Total aset}}$$

$$\text{REC} = \frac{\text{Piutang}}{\text{Total aset}}$$

Pengertian :

- Persediaan merupakan seluruh barang persediaan yang dimiliki oleh perusahaan.
- Piutang merupakan seluruh piutang yang dimiliki perusahaan.

- Total aset merupakan total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud.

3.1.3.6 Kantor Akuntan Publik

Dalam Aturan Etika Departemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001 disebutkan bahwa: “KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.”

Kantor akuntan publik yang memiliki nama besar (Big 4) dipandang sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan dan kualitas dari Kantor Akuntan Publik yang tidak memiliki nama besar (Francis and Krishnan dalam Halim, 2005). Kantor Akuntan Publik atau Auditor yang berkualitas tinggi membuat sedikit kesalahan daripada auditor yang berkualitas rendah sehingga memiliki *fee* audit yang lebih tinggi dari auditor yang berkualitas rendah (Diacon dalam Halim, 2005). Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam The Big 4 adalah :

- KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst and Young (E & Y).
- KAP Haryanto Sahari & Co. yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).
- KAP Osman Bing Satrio & Co. yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (DTT).
- KAP Siddharta, Siddharta, dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Variabel ini menggunakan skala nominal, yaitu angka 1 untuk mengindikasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik Big 4 serta angka 0 untuk mengindikasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik selain Big 4. Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan BIG4 dalam persamaan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut :

1. Peraturan tentang *corporate governance* perusahaan manufaktur tidak serumit perusahaan yang lain (perusahaan keuangan dan perbankan).
2. Saham perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006-2008.
3. Perusahaan telah *listing* di BEI paling lambat tanggal 31 Desember 2001 dan tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan.
4. Perusahaan menyertakan laporan tahunan beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada alasan : (1) mudah didapat, (2) biayanya lebih murah, (3) penggunaan laporan keuangan yang didalamnya telah diaudit oleh akuntan publik sehingga data terpercaya keabsahannya. Data diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan JSX Watch serta dilengkapi data yang berasal dari laporan perusahaan yang dipublikasikan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. Data-data ini diperoleh dari Pojok BEI Undip, ICMD, website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id , dan berbagai macam literatur yang ada.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan memperhatikan penyebaran data (titik) pada *normal p-plot of regression standardized residual* dari variabel dependen, dimana :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan secara linier. Multikolonieritas terjadi apabila antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolonieritas adalah dengan memperhatikan :

1. Besaran korelasi antar variabel independen

Pedoman suatu model regresi bebas multikolonieritas, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Koefisien korelasi antara variabel-variabel independen harus lemah, tidak lebih dari 90 persen atau dibawah 0,90 (Ghozali, 2005).
- b) Jika korelasi kuat antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel independen lainnya (umumnya diatas 0,90), maka hal ini menunjukkan terjadinya multikolonieritas yang serius (Ghozali, 2005).

2. Nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi.

Persamaan yang digunakan adalah :
$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance}}$$

Nilai *cutoff* yang digunakan dan dipakai untuk menandai adanya faktor-faktor multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolonieritas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya.

c. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah terjadinya varians yang tidak sama untuk variabel independen yang berbeda. Heterokedastisitas dapat terdeteksi dengan melihat plot antara nilai taksiran dengan residual. Untuk melihat heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan ini adalah:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk satu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka akan terjadi masalah heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu-sumbu maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan

dengan *Run Test* untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara *fee* audit dengan variabel-variabel independen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{LN FEE} = & b_0 + b_1 (\text{LN ASSETS}) + b_2 (\text{SUBS}) + b_3 (\text{LEV}) + b_4 (\text{ROA}) + \\ & b_5 (\text{INV}) + b_6 (\text{REC}) + b_7 (\text{BIG4}) + b_8 (\text{BoardInd}) + b_9 \\ & (\text{BoardSize}) + b_{10} (\text{BoardMeet}) + b_{11} (\text{ACInd}) + b_{12} (\text{ACSize}) + \\ & b_{13} (\text{ACMeet}) + e \end{aligned}$$

Dimana :

LN FEE	=	logaritma natural dari <i>fee</i> audit
LN ASSETS	=	logaritma natural dari total aktiva
SUBS	=	akar pangkat dua dari jumlah anak perusahaan
LEV	=	rasio hutang atas aktiva perusahaan
ROA	=	<i>return of asset</i>
INV	=	rasio persediaan terhadap total aset
REC	=	rasio piutang atas aktiva perusahaan
BIG4	=	auditor Big 4

BoardInd	=	jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris
BoardSize	=	jumlah anggota dewan komisaris
BoardMeet	=	jumlah rapat yang diadakan dewan komisaris per tahun buku
ACInd	=	jumlah komisaris independen dalam komite audit
ACSize	=	jumlah anggota komite audit
ACMeet	=	jumlah rapat yang diadakan komite audit per tahun buku

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan tingkat *fee* audit maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis penelitian terhadap variabel-variabel dengan pengujian dibawah ini :

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Koefisien determinasi untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, apabila $R^2=0$ berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan jika $R^2=1$ berarti suatu hubungan yang sempurna. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 maka digunakan *adjusted* R^2 sebagai koefisien determinasi.

b. Uji F

Uji ini dilakukan untuk menguji variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel LNASSETS, SUBS, LEV, ROA, INV, REC, BIG4, BoardInd, BoardSize, BoardMeet, ACInd, ACSIZE, ACMeet berpengaruh terhadap *fee* audit.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel LNASSETS, SUBS, LEV, ROA, INV, REC, BIG4, BoardInd, BoardSize, BoardMeet, ACInd, ACSIZE, ACMeet tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara *partial* variabel ukuran LNASSETS, SUBS, LEV, ROA, INV, REC, BIG4, BoardInd, BoardSize, BoardMeet, ACInd, ACSIZE, ACMeet berpengaruh terhadap *fee* audit.

2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara *partial* variabel ukuran LNASSETS, SUBS, LEV, ROA, INV, REC, BIG4, BoardInd, BoardSize, BoardMeet, ACInd, ACSIZE, ACMeet tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2006 sampai tahun 2008. Metode pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan memilih sampel sesuai kriteria. Jumlah sampel dalam penelitian yang diperoleh sebanyak 20 perusahaan, sehingga observasi secara keseluruhan sejak tahun 2006-2008 diperoleh sebanyak 60 perusahaan sampel.

Tabel 4.1 Metode Pengambilan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar selama periode 2006-2008	142
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan	(84)
Laporan tahunan tidak lengkap	(30)
Perusahaan yang mengalami delisting selama periode penelitian	(8)
Data perusahaan yang dapat dianalisis	20
Perusahaan yang terpilih menjadi sampel selama periode 2006-2008	60

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi besarnya *professional fees*, jumlah anak perusahaan, ukuran perusahaan, persediaan dan piutang perusahaan, ROA, *leverage*, Kantor Akuntan Publik, proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen dalam komite audit, jumlah anggota komite audit, dan jumlah rapat komite audit. Data diperoleh dari

laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia, serta *Indonesian Capital market Directory* (ICMD).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, nilai maksimum dan rata-rata dari sampel. Analisis deskriptif dalam Tabel 4.2 merupakan analisis deskriptif untuk variabel bebas *fee* audit dan variabel terikat bukan kategori nominal, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif Tahun 2006-2008

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNFEES	60	19.022217	28.476889	22.22775136	1.648000774
BoardInd	60	1	5	1.92	1.078
BoardSize	60	3	10	4.93	2.154
BoardMeet	60	2	12	5.15	2.049
ACInd	60	1	2	1.03	.181
ACSize	60	3	4	3.15	.360
ACMeet	60	2	13	5.97	2.923
LNASSETS	60	20.280589	32.022255	28.50737919	1.749518367
SUBS	60	1.000000	4.790000	2.50716667	1.110739701
LEV	60	.000070	.715402	.15817170	.169990612
ROA	60	-.197159	.154651	.06309472	.058476926
REC	60	.012021	.518900	.19610510	.105759975
INV	60	.036530	.525306	.18412265	.103346446
BIG4	60	0	1	.80	.403
Valid (listwise)	N 60				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.2, dari 60 perusahaan yang menjadi sampel perusahaan, nilai rata-rata variabel LNFEED adalah 22,2277 dengan nilai minimal dan maksimal 19,0222 dan 28,4768. Variabel BoardInd memiliki nilai rata-rata 1,92 dengan nilai minimal dan maksimal 1 dan 5. Variabel BoardSize memiliki nilai rata-rata 4,93 dengan nilai minimal dan maksimal 3 dan 10. Variabel BoardMeet memiliki nilai rata-rata 5,15 dengan nilai minimal dan maksimal 2 dan 12. Variabel ACInd memiliki nilai rata-rata 1,03 dengan nilai minimal dan maksimal 1 dan 2. Variabel ACSIZE memiliki nilai rata-rata 3,15 dengan nilai minimal dan maksimal 3 dan 4. Variabel ACMET memiliki nilai rata-rata 5,97 dengan nilai minimal dan maksimal 2 dan 13. Variabel LNASSETS memiliki nilai rata-rata 28,5073 dengan nilai minimal dan maksimal 20,2805 dan 32,0222. Variabel SUBS memiliki nilai rata-rata 2,5071 dengan nilai minimal dan maksimal 1 dan 4,79. Variabel LEV memiliki nilai rata-rata 0,1581 dengan nilai minimal dan maksimal 0,000069 dan 0,7154. Variabel ROA memiliki nilai rata-rata 0,0630 dengan nilai minimal dan maksimal -0,1971 dan 0,1546. Variabel REC memiliki nilai rata-rata 0,1961 dengan nilai minimal dan maksimal 0,012 dan 0,5189. Variabel INV memiliki nilai rata-rata 0,1841 dengan nilai minimal dan maksimal 0,0365 dan 0,5253. Variabel BIG4 merupakan variabel dummy sehingga nilai minimum dan maksimumnya adalah 0 dan 1. Artinya nilai minimum diwakilkan untuk perusahaan yang tidak memakai jasa KAP BIG4 dan nilai maksimumnya diwakilkan untuk perusahaan yang memakai jasa KAP BIG4.

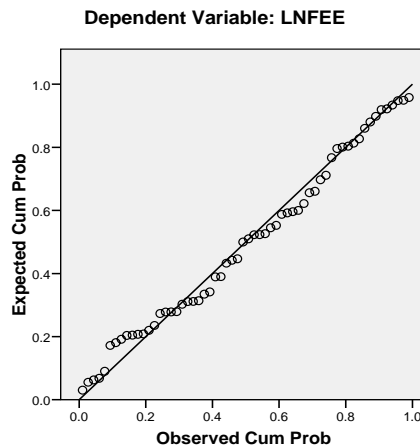
4.2.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Gambar 4.1 Hasil Uji P-Plot of Regression Standardized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa grafik *normal probability plot of regresison standardized* menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti

garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Untuk memperkuat pengujian dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 4.3 *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,71073342
Most Extreme	Absolute	,078
Differences	Positive	,078
	Negative	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		,602
Asymp. Sig. (2-tailed)		,862

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Dari tabel 4.3, terlihat bahwa besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,602 dan variabel memiliki nilai probabilitas 0,862. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* adalah apabila nilai probabilitas untuk nilai residual lebih besar dari 0,05. Sehingga dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, mendukung pengujian dengan menggunakan grafik plot.

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan uji nilai *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Guna mengetahui ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan cara melihat nilai *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari nilai batas *tolerance value* adalah 0.01 dan VIF adalah 10. Apabila *tolerance value* dibawah 0.01 atau nilai VIF di atas 10 maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006). Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel 4.4:

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
BoardInd	,160	6,252
BoardSize	,131	7,605
BoardMeet	,816	1,225
ACInd	,855	1,169
ACSize	,687	1,456
ACMeet	,801	1,249
LNASSETS	,337	2,964
SUBS	,410	2,439
LEV	,426	2,349
ROA	,505	1,981
REC	,666	1,501
INV	,532	1,879
BIG4	,716	1,398

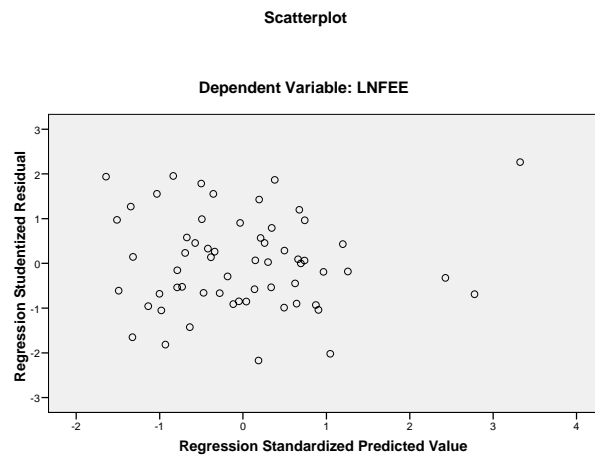
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Dari Tabel 4.4, dalam tabel *coefficient*, menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Hasil VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi ini.

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Pada gambar 4.2 dapat dilihat hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas. Hal ini dapat terlihat dimana titik-titik tersebar tanpa membentuk suatu pola tertentu dan tersebar baik dibawah atau diatas angka 0 pada sumbu Y.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan *Runs Test* untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi (Ghozali, 2006).

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value	,00998
Cases < Test Value	30
Cases > = Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	24
Z	-1,823
Asymp. Sig. (2-tailed)	,068

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Pada Tabel 4.5, terlihat bahwa nilai test sebesar -1,823 dengan probabilitas 0,068. Karena nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut terbebas dari masalah autokorelasi

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel bebas yang dijelaskan oleh regresi. Berdasarkan hasil olah data dengan program SPSS seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
,902	,814	,761

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan tabel 4.6, hasil *Adjusted R Square* adalah 0,761. Hal ini menunjukkan bahwa tiga belas variabel dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel terikat *fee* audit sebesar 76,1 persen sedangkan sisanya sebesar 23,9 persen di pengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.2.3.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (*fee* audit). Uji F dilakukan dengan membandingkan besarnya F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dapat pula dengan melihat probabilitasnya. Apabila F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} maka semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sedangkan pengujian dengan melihat probabilitas yaitu apabila probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansi (5%) maka model diterima.

Besarnya F_{hitung} atau probabilitas dapat dilihat dalam tabel ANOVA. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	130,435	13	10,033	15,486	,000
Residual	29,803	46	,648		
Total	160,238	59			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan hasil perhitungan, seperti yang tampak pada Tabel 4.7, diperoleh F_{hitung} sebesar 15,486 dan F_{tabel} sebesar 1,99 atau dengan kata lain F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel LNASSETS, SUBS, LEV, ROA, INV, REC, BIG4, BoardInd, BoardSize, BoardMeet, ACInd, ACSIZE dan ACMeet secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen *fee* audit.

4.2.3.3 Uji t

Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel tidak berhubungan, memiliki rata-rata yang berbeda. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara nilai dua nilai rata-rata dengan standar *error* dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2005). Dengan dilakukan uji t ini dapat diketahui apakah variabel dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit. Hipotesis yang hendak di uji adalah sebagai berikut:

H_0 : suatu variabel bebas bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat.

Ha : suatu variabel bebas merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat.

Pengujiannya adalah dengan membandingkan antara t tabel dengan t hitung. Penentuan t dapat diperoleh dengan cara melihat df (*degree of freedom*) = $n-k$ ($60-13=47$), dengan tingkat signifikansi 95 persen ($\alpha=0.05$), sehingga dapat diketahui t tabel sebesar 2,011. Jika t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji Signifikansi Parameter Individual / Partial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,762	2,888		3,380	,001
BoardInd	,495	,240	,327	2,058	,045
BoardSize	,015	,141	,018	,105	,917
BoardMeet	-,063	,055	-,080	-1,135	,262
ACInd	1,048	,516	,140	2,032	,048
ACSize	,624	,351	,136	1,778	,082
ACMeet	-,001	,031	-,003	-,044	,965
LNASSETS	,302	,103	,321	2,933	,005
SUBS	,049	,027	,183	1,844	,072
LEV	-1,122	,945	-,116	-1,187	,241
ROA	-4,842	2,560	-,169	-1,891	,065
REC	-1,935	1,214	-,124	-1,594	,118
INV	-,174	1,390	-,011	-,125	,901
BIG4	,752	,307	,184	2,449	,018

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa variabel BoardInd memiliki probabilitas sebesar 0,495 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar 2,058 dan 0,045. Variabel BoardSize memiliki probabilitas sebesar 0,015 dengan nilai t

hitung dan signifikansi sebesar 0,105 dan 0,917. Variabel BoardMeet memiliki probabilitas sebesar -0,063 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar -1,135 dan 0,262. Variabel ACInd memiliki probabilitas sebesar 1,048 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar 2,032 dan 0,048. Variabel ACSize memiliki probabilitas sebesar 0,624 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar 1,778 dan 0,082. Variabel ACMeet memiliki probabilitas sebesar -0,001 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar -0,044 dan 0,965. Variabel LNASSETS memiliki probabilitas sebesar 0,302 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar 2,933 dan 0,005. Variabel SUBS memiliki probabilitas sebesar 0,049 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar 1,844 dan 0,072. Variabel LEV memiliki probabilitas sebesar -1,122 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar -1,844 dan 0,072. Variabel ROA memiliki probabilitas sebesar -4,842 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar -1,891 dan 0,065. Variabel REC memiliki probabilitas sebesar -1,935 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar -1,594 dan 0,118. Variabel INV memiliki probabilitas sebesar -0,174 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar -0,125 dan 0,901. Variabel BIG4 memiliki probabilitas sebesar 0,752 dengan nilai t hitung dan signifikansi sebesar 2,449 dan 0,018.

Dari pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat empat variabel yaitu variabel BoardInd, ACInd, LNASSETS dan BIG4 yang memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05. Sedangkan sembilan variabel lainnya yaitu BoardSize, BoardMeet, ACSize, ACMeet, SUBS, LEV, ROA, REC, dan INV memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05.

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel BoardSize, BoardMeet, ACSIZE, ACMeet, SUBS, LEV, ROA, REC, dan INV tidak mempengaruhi *fee* audit atau menolak hipotesis yang diajukan. Sedangkan variabel BoardInd, ACInd, LNASSETS dan BIG4 berpengaruh terhadap *fee* audit atau menerima hipotesis yang diajukan.

4.3 Interpretasi Hasil

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian antara pengaruh BoardInd, BoardMeet, BoardSize, ACInd, ACMeet dan ACSIZE terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2006-2008.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 = Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

Dari tabel 4.8 diketahui variabel BoardInd memiliki pengaruh positif dengan koefisien 0,495 dan signifikansi 0,045 dibawah 0,05. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan karena tidak ada pengaruh negatif yang signifikan antara independensi dewan komisaris dengan *fee* audit eksternal. Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel BoardInd terbukti mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit eksternal.

Dengan demikian penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Beasley (1996) dalam Yatim *et al.* (2006) dan Dechow *et al.* (1996) bahwa dewan komisaris yang lebih independen akan menurunkan risiko

yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor sehingga akan mengurangi *fee* audit.

Namun penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Carcello *et al.* (2002) dan Abbot *et al.* (2003). Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa dewan komisaris yang lebih independen akan menuntut kualitas yang lebih tinggi dari auditor eksternal, sehingga menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur *governance* yang kuat cenderung mencari jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi untuk melindungi nama baik perusahaan dan melindungi kekayaan pemegang saham. Kualitas audit yang tinggi menuntut *fee* audit yang lebih tinggi pula.

H_2 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *fee* audit eksternal.

Dari tabel 4.8 diketahui variabel BoardSize memiliki pengaruh positif dengan koefisien 0,015 dan signifikansi 0,917 diatas 0,05. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini disebabkan pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Beasley (1996) dalam Yatim *et al.* (2006) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar. Hal ini menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan

funksinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Yatim *et al.* (2006) bahwa frekuensi pertemuan dewan tidak memiliki pengaruh terhadap *fee* audit.

H₃ = Intensitas rapat yang diadakan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

Dari tabel 4.8 diketahui variabel BoardMeet memiliki pengaruh negatif dengan koefisien -0,063 dan signifikansi 0,262 diatas 0,05. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini disebabkan intensitas rapat dewan komisaris tidak mempengaruhi hasil audit sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap *fee* audit.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yatim *et al.* (2006) bahwa *fee* audit eksternal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ukuran dewan, frekuensi pertemuan dewan dan adanya komite manajemen resiko. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Carcello *et al.* (2002) bahwa dewan komisaris perusahaan yang *diligent* (sering mengadakan rapat) akan lebih peduli dan lebih mendukung fungsi audit eksternal serta akan lebih menginginkan penambahan terhadap lingkup kerja audit yang akan meningkatkan *fee* audit.

H₄ = Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

Dari tabel 4.8 diketahui variabel ACInd memiliki pengaruh positif dengan koefisien 1,048 dan signifikansi 0,048 dibawah 0,05. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan karena independensi komite audit tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap *fee* audit. Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel ACInd terbukti mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit.

Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung pendekatan berbasis risiko untuk jasa audit (praktik tata kelola perusahaan yang baik akan menurunkan *fee* audit eksternal), suatu komite audit yang independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses pelaporan keuangan sehingga mengurangi timbulnya masalah dalam pelaporan keuangan (Blue Ribbon Committee, 1999; Abbott *et al.*, 2004; Dechow *et al.*, 1996). Komite audit yang independen akan lebih baik dalam hal perlindungan reliabilitas proses akuntansi dan memajukan objektivitas dari komite audit. Hal ini akan memperkuat pengendalian internal dan mengarah kepada berkurangnya risiko pengendalian. Oleh karena itu pengujian substantif dapat dikurangi sehingga diharapkan dapat memperkecil *fee* audit.

Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Abbot *et al.* (2001) bahwa komite audit yang independen dan aktif menuntut kualitas audit yang lebih tinggi berkaitan dengan perhatian yang besar terhadap kerugian moneter maupun hilangnya nama baik akibat kesalahan dalam pelaporan keuangan. Sehingga kualitas audit yang tinggi menuntut *fee* audit yang tinggi pula.

H_5 = Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

Dari tabel 4.8 diketahui variabel ACSize memiliki pengaruh positif dengan koefisien 0,722 dan signifikansi 0,065 dan diatas 0,05. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan.

Jumlah anggota komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dikarenakan hampir keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah mempunyai komite audit. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Edaran BAPEPAM SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek jakarta untuk memiliki komite audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hay *et al.* (2008) dalam Widiyari (2009) yang menemukan bahwa sejak komite audit menjadi persyaratan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *New Zealand Stock Exchange*, variabel penelitian komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee audit*.

H_6 = Intensitas rapat yang diadakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

Dari tabel 4.8 diketahui variabel ACMeet memiliki pengaruh negatif dengan koefisien -0,001 dan signifikansi 0,965 diatas 0,05. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Huang (2004) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas audit

dengan intensitas pertemuan komite audit maupun ukuran komite audit. Kualitas audit hanya dipengaruhi oleh keahlian (*expertise*) komite audit. Dengan demikian maka intensitas pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sehingga tidak berpengaruh pula terhadap *fee* audit eksternal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Abbot *et al.* (2003) yang menemukan adanya pengaruh yang positif signifikan antara independensi komite audit dan komite audit *expertise* terhadap *fee* audit, tapi tidak ada pengaruh antara frekuensi rapat komite audit dengan *fee* audit. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Goodwin-Stewart dan Kent (2006) bahwa keberadaan komite audit, pertemuan komite audit serta peningkatan fungsi audit internal berhubungan dengan kenaikan *fee* audit. Hal ini konsisten dengan permintaan peningkatan kualitas audit oleh komite audit, dimana perusahaan dengan struktur *governance* yang baik memiliki permintaan kualitas audit yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan *fee* audit eksternal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Independensi dewan komisaris berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap *fee* audit. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, tanggung jawab komisaris independen meliputi melakukan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan pengembangan kontrol dalam perusahaan sebagai pertanggung jawaban kepada para *stakeholders* serta untuk melindungi reputasi pribadi mereka. Sehingga komisaris independen akan meningkatkan permintaan terhadap audit eksternal yang lebih baik. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa struktur *governance* yang kuat akan meningkatkan permintaan terhadap jasa audit eksternal yang akan berpengaruh terhadap peningkatan *fee* audit.
2. Ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini disebabkan pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Intensitas rapat yang dilakukan dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini disebabkan rapat yang

dilakukan dewan komisaris tidak mempengaruhi kualitas audit sehingga tidak mempengaruhi *fee* audit.

4. Independensi komite audit berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap *fee* audit. Hal ini dikarenakan komite audit yang lebih independen menuntut kualitas audit yang tinggi untuk melindungi nama baik mereka. Kualitas audit yang lebih baik akan berakibat pada tingginya *fee* audit.
5. Ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini dikarenakan hampir keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah memiliki komite audit sesuai dengan yang ditentukan BAPEPAM, dengan ketentuan minimal jumlah komite audit adalah tiga orang.
6. Intensitas rapat yang dilakukan komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini disebabkan intensitas rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sehingga tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang teridentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Karena keterbatasan data tentang *fee* audit, maka dalam penelitian ini diterapkan penggunaan data *professional fees* untuk memberikan nilai pada variabel *fee* audit.

2. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini masih sedikit serta periode observasi yang hanya menggunakan tahun 2006-2008.
3. Jumlah sampel hanya dari satu jenis industri saja (perusahaan manufaktur).

5.3 **Saran**

Mengacu kepada beberapa keterbatasan yang ada, beberapa saran untuk penelitian mendatang disarankan untuk :

1. Penelitian mendatang sebaiknya menggunakan perusahaan-perusahaan yang mencantumkan data tentang *fee* audit daripada data mengenai *professional fees* dalam laporan keuangannya sehingga lebih menggambarkan data *fee* audit.
2. Memperpanjang periode pengamatan dan menambahkan populasi perusahaan dari semua jenis kategori industri dengan tetap memperhatikan perbedaan pada faktor perbankan dan non perbankan supaya hasil penelitian dapat digeneralisir.

Daftar Pustaka

- Akhmad Syakhroza. 2003. "Teori Corporate Governance". *Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 08/ Th. XXXII, Agustus.
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2004. *Komisaris Independen. Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Arifin. (2005). "Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)". Sidang Pengukuhan Guru Besar Undip, E-Prints.
- Abbott, L.J., Parker, S. and Peters, G.F. (2004), "Audit committee characteristics and restatements", *Auditing : A Journal of Practice & Theory*, Vol. 23 No. 1, pp. 69-87.
- Abbott, L.J., Parker, S., Peters, G.F. and Raghunandan, K. (2003), "The association between audit committee characteristics and audit fees", *Auditing : A Journal of Practice & Theory*, Vol. 22 No. 2, pp. 17-32.
- Anderson, D., Mansi, S.A. and Reeb, D.M. (2004), "Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 37 No. 3, pp. 315-342.
- Beasley, M.S. (1996), "An empirical analysis of the relation between the boards of directors composition and financial statement fraud", *The Accounting Review*, Vol. 71 No. 4, pp. 443-465.
- Blue Ribbon Committee (1999), *Report and Recommendations on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees*, The New York Stock Exchange and the National Association of Securities Dealers, New York, NY.
- Boediono, Gideon SB. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur*. *Seminar Nasional Akuntansi 8*.
- Boo, El'fred., Divesh Sharma. (2008). "Effect of Regulatory Oversight on the Association Between Internal Governance Characteristics and Audit Fees", *Journal of Accounting and Finance*, No. 48, H. 51-71.
- Cadbury Committee (1992), *Report on the Financial Aspects of Corporate Governance*, Gee and Company Limited, London.

- Carcello, J.V., Hermanson, D.R., Neal, T.I., and Riley, R.A. (2002), "Board Characteristics and Audit Fees", *Contemporary Accounting Research*, Vol. 19 No. 3, pp. 365-384.
- Darmawati, Deni, Khomsiyah dan Rika Gelar Rahayu. 2005. Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 8 (Jan): 65-81.
- Dickins, Denise E. Julia, L. Higgs and Terrance R. Skantz. (2008). "Estimating Audit Fees Post SOX". *American Accounting Association*, Vol. 2, H. A9-A18.
- Fama, E.F., and Jensen, M. (1983a), "Separation of ownership and control", *Journal of Law & Economics*, Vol. 26 No.2, pp. 301-326.
- Fama, E.F., and Jensen, M. (1983b), "Agency problems and residual claims", *Journal of Law & Economics*, Vol. 26 No.2, pp. 327-349.
- FCGI. 2001. Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Jilid I. FCGI, Edisi ke-3.
- FCGI. 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jilid II. FCGI. Edisi ke-2.
- Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Goodwin-Stewart, J. and Kent, P. (n.d.), "The relation between external audit fees, audit committee characteristics and internal audit", *Accounting and Finance (in press)*.
- Halim, Yonathan. 2005. "Peranan Metode Lowballing Cost oleh Kantor Akuntan Publik di Surabaya." *Skripsi*, Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Hay, David., R. Knechel dan Helen Ling. 2008. "Evidence on the Impact of Internal Control and Corporate Governance on Audit Fees." *International Journal of Auditing*, No. 12, h. 9-24.
- Wei Huang, Hua dan Sheela Thiruvadi. 2004. "Audit Committee Characteristics and Corporate Fraud." *International Journal of Public Information Systems*, h. 71-82.

- Kaihatu, T.S. (2006). "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 1, H.1-9.
- Kusumawati, D. W. dan Riyanto, B. 2005. "Corporate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja." Simposium Nasional Akuntansi VIII, 248-261.
- Lastanti, Hexana.S. (2005). "Hubungan Struktur *Corporate Governance* Dengan Kinerja Perusahaan Dan Reaksi Pasar". Prosiding Konferensi Nasional Akuntansi H.1-17.
- Mitra, Santanu., Mahmud Hossain and Donald R. Deis. 2007. "The Empirical Relationship Between Ownership Characteristics and Audit Fees." *Rev Quant Finance Accounting*, No. 28, h. 257-285.
- Ruru, Bacelius. (2004), "Kiprah dan Dinamika Komite Audit dalam Penegakan Good Corporate Governance", *Forum Komite Audit 4*, Ikatan Komite Audit Indonesia.
- Simunic, D. and Stein, M.T. (1996), "The impact of litigation risk on audit pricing: a review of the economics and the evidence", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 15 No. 2, pp. 145-9.
- Toha, Akhmad. 2004. "Efektivitas Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 8, h. 17-41.
- Widiasari, Esti., (2009), "Pengaruh Pengendalian Internal Perusahaan dan Struktur Corporate Governance Terhadap Fee Audit", *Skripsi S-1*, Universitas Diponegoro.
- Yatim, Puan., Pamela Kent and Peter Clarkson. (2006). "Governance Structures, Ethnicity, and Audit Fees of Malaysian Listed Firms".

Lampiran-Lampiran

LAMPIRAN A

Data Mentah Penelitian

Tahun	Nama Perusahaan	BoardInd	BoardSize	BoardMeet	ACInd	ACSize	ACMeet	LNASSETS	SUBS	LEV	ROA	REC	INV	BIG4	LNFEES
2006	AKR Corporindo	1	3	4	1	3	4	28.48003471	8	0.06053	0.0548	0.20968	0.17597	1	21.727526
2006	Astra Graphia	1	3	4	1	3	5	27.09460225	1	0.00364	0.09501	0.16823	0.16312	1	20.745474
2006	Astra Internasional	5	9	4	1	3	10	31.69024424	24	0.19727	0.06408	0.07869	0.06906	1	25.611749
2006	Astra Otopart	2	5	4	1	3	12	28.73897629	16	0.10878	0.09315	0.19555	0.1354	1	22.339282
2006	Barito Pacific Timber	1	4	4	1	3	4	28.18441202	3	0.1024	0.00413	0.01202	0.0596	0	22.694983
2006	Citra Turbindo	1	3	8	1	4	4	28.08828365	9	0.04512	0.13364	0.24077	0.28644	1	21.326781
2006	Fajar Surya Wisesa	1	3	12	1	3	12	28.86121466	1	0.55441	0.02973	0.07524	0.10454	1	20.709763
2006	Holcim Indonesia	3	6	4	1	3	10	29.58629387	9	0.58186	0.0249	0.06073	0.04442	1	24.102831
2006	Indocement Tunggul Prakasa	3	7	2	1	3	5	29.89260507	3	0.05366	0.06176	0.06556	0.09931	1	22.838931
2006	Kabelindo Murni	1	3	4	1	3	4	26.35604659	1	0.0519	0.0376	0.24035	0.13479	0	19.022217

Tahun	Nama Perusahaan	BoardInd	BoardSize	BoardMeet	ACInd	ACSize	ACMet	LNASSETS	SUBS	LEV	ROA	REC	INV	BIG4	LNFEES
2006	Kalbe Farma	2	5	6	1	4	4	29.16241515	2	0.0735	0.1463	0.16442	0.19129	1	23.53938
2006	Lautan Luas	1	3	3	1	3	3	28.23561901	16	0.13735	0.01621	0.28358	0.20413	1	21.664834
2006	Metrodata Electronics	1	3	5	1	3	6	27.33099717	3	0.28686	0.02805	0.45866	0.15756	1	21.819713
2006	Modern International	1	3	4	1	3	4	27.06501650	8	0.04549	0.00274	0.24935	0.52531	1	21.746718
2006	Selamat Sempurna	1	3	4	1	3	5	27.29790356	2	0.0433	0.09233	0.28428	0.25971	0	21.173413
2006	SMART	3	7	5	1	3	12	29.30097652	13	0.10048	0.11823	0.05992	0.13371	0	22.946192
2006	Sorini Corporation	2	3	4	1	3	4	20.28058887	3	0.07112	0.04326	0.19036	0.28665	1	20.463167
2006	Tira Austenite	1	3	1	1	3	12	26.22435450	5	0.13086	0.02579	0.19232	0.29551	1	21.697879
2006	Tunas Ridean	2	5	4	1	3	4	28.68108966	7	0.29211	0.00777	0.42902	0.05521	1	21.39621
2006	United Tractor	3	7	2	1	3	23	30.05119776	6	0.22922	0.08272	0.18322	0.14258	1	23.26274
2007	AKR Corporindo	2	3	3	1	3	3	28.88309557	9	0.11808	0.05467	0.24962	0.17396	1	22.956516
2007	Astra Graphia	1	3	4	1	3	5	27.1603089	1	0.00175	0.1154	0.16933	0.19766	1	20.939182

Tahun	Nama Perusahaan	Board Ind	Board Size	Board Meet	AC Ind	AC Size	AC Meet	LN ASSETS	SUB S	LEV	ROA	REC	INV	BIG 4	LN FEE
2007	Astra Internasional	5	10	4	1	4	10	31.7823696	24	0.16009	0.09677	0.09475	0.07213	1	25.882988
2007	Astra Otopart	3	7	5	1	3	5	28.87062763	16	0.09724	0.03169	0.207	0.14389	1	22.826058
2007	Barito Pacific Timber	2	6	6	1	3	4	30.45905158	12	0.7154	0.00263	0.069	0.12075	1	22.306976
2007	Citra Turbindo	1	3	8	1	4	5	28.07762093	9	0.0538	0.1371	0.28444	0.1333	1	21.911068
2007	Fajar Surya Wisesa	1	3	4	1	3	13	28.95798693	1	0.51235	0.03236	0.12319	0.10454	1	21.050788
2007	Holcim Indonesia	2	6	4	1	3	7	29.60624732	9	0.53446	0.0235	0.0685	0.03653	1	24.183895
2007	Indocement Tunggul Prakasa	3	7	2	1	3	4	29.93520768	3	0.23053	0.09821	0.08034	0.09946	1	22.520225
2007	Kabelindo Murni	2	4	6	1	3	4	26.79326752	1	0.05493	0.01228	0.30248	0.1392	0	20.009479
2007	Kalbe Farma	3	5	5	1	4	5	29.26772637	13	0.05215	0.13734	0.18043	0.27774	1	23.526226
2007	Lautan Luas	1	3	3	1	3	4	28.38952711	16	0.01802	0.03357	0.25855	0.18644	1	22.016897
2007	Metrodata Electronics	1	3	8	1	3	5	27.78137969	6	0.02776	0.0245	0.5189	0.13071	1	22.301081
2007	Modern International	1	3	4	1	3	4	27.53680365	4	0.09383	0.10198	0.18945	0.2796	1	21.675779
2007	Selamat Sempurna	1	3	8	1	3	4	27.44475122	1	0.04549	0.10263	0.25042	0.29527	0	20.695866
2007	SMART	3	7	5	1	3	11	29.71832774	13	0.03767	0.12265	0.11538	0.18107	0	22.694508
2007	Sorini Corporation	1	3	3	1	3	3	27.45964506	3	7E-05	0.11179	0.1811	0.35535	1	20.200867
2007	Tira Austenite	1	3	3	1	3	12	26.19919095	5	0.14416	0.01056	0.19385	0.34188	0	19.870629
2007	Tunas Ridean	2	5	4	1	4	4	28.83856105	7	0.29254	0.05674	0.42054	0.04981	1	20.99558

Tahun	Nama Perusahaan	Board Ind	Board Size	Board Meet	AC Ind	AC Size	AC Meet	LN ASSETS	SUB S	LEV	ROA	REC	INV	BIG 4	LN FEE
2007	United Tractor	3	8	4	2	3	7	30.19617191	7	0.15095	0.11483	0.2313	0.16314	1	23.989483
2008	AKR Corporindo	2	3	9	1	3	9	29.21511065	10	0.1489	0.04308	0.18943	0.16082	1	22.493825
2008	Astra Graphia	1	3	5	1	3	8	27.45792194	1	0.02092	0.0743	0.19893	0.22016	1	21.373796
2008	Astra Internasional	5	9	4	2	4	10	32.02225523	24	0.16448	0.11383	0.19783	0.10733	1	28.476889
2008	Astra Otopart	3	7	5	1	3	5	29.01263353	18	0.0798	0.14217	0.14997	0.16829	1	23.258469
2008	Barito Pacific Timber	1	6	6	1	3	4	30.47846919	14	0.34704	0.1972	0.04065	0.10126	1	24.212047
2008	Citra Turbindo	1	3	6	1	4	5	28.18641311	9	0.06026	0.1029	0.20401	0.24322	1	22.843024
2008	Fajar Surya Wisesa	1	3	4	1	3	4	28.94435437	1	0.50714	0.00983	0.09402	0.1307	1	22.840288
2008	Holcim Indonesia	2	5	4	2	3	5	29.6689868	9	0.52034	0.03677	0.07551	0.05037	1	22.583929
2008	Indocement Tungal Prakasa	3	7	4	1	3	5	30.05464677	5	0.00882	0.15465	0.08254	0.13426	1	22.828652
2008	Kabelindo Murni	2	3	6	1	3	4	26.85255704	1	0.07217	0.00869	0.32398	0.0968	0	20.266313
2008	Kalbe Farma	2	6	4	1	3	2	29.37215942	12	8.6E-05	0.12392	0.17552	0.28159	1	23.327158
2008	Lautan Luas	3	5	5	1	3	5	28.88231243	16	0.15586	0.04176	0.22501	0.29967	1	23.371071
2008	Metrodata Electronics	1	3	4	1	3	6	27.88472918	6	0.09996	0.02324	0.35705	0.17887	1	22.253135
2008	Modern International	1	3	4	1	3	4	27.39636483	4	0.09202	0.0026	0.21873	0.33024	1	21.851692
2008	Selamat Sempurna	1	3	4	1	3	4	27.55818499	1	0.03859	0.09838	0.26288	0.30801	0	20.372946

Tah un	Nama Perusahaan	BoardI nd	BoardSi ze	BoardM eet	ACIn d	ACSi ze	ACMe et	LNASSET S	SUB S	LEV	ROA	REC	INV	BIG 4	LNFEET
2008	SMART	3	9	5	1	3	12	29.936194 45	14	0.043 17	0.104 37	0.085 06	0.133 71	0	23.1618 5
2008	Sorini Corporation	1	3	9	1	3	9	27.736371 27	3	0.069 28	0.128 25	0.163 12	0.429 04	1	19.5604 89
2008	Tira Austenite	1	3	12	1	3	12	26.155160 06	5	0.074 5	0.005 82	0.217 44	0.369 38	0	19.6146 01
2008	Tunas Ridean	1	5	4	1	4	4	28.907313 09	7	0.310 79	0.068 39	0.315 21	0.067 25	1	21.5742 71
2008	United Tractor	3	8	4	1	3	4	30.759872 49	7	0.165 04	0.116 46	0.158 91	0.229 62	1	24.0167 67

LAMPIRAN B

Hasil Statistik Deskriptif

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BIG4, REC, ROA, ACInd, BoardMeet, ACMeet, INV, SUBS, ASize, LEV, LNAsset, BoardInd, BoardSize ^a		Enter

a. All requested variables entered.

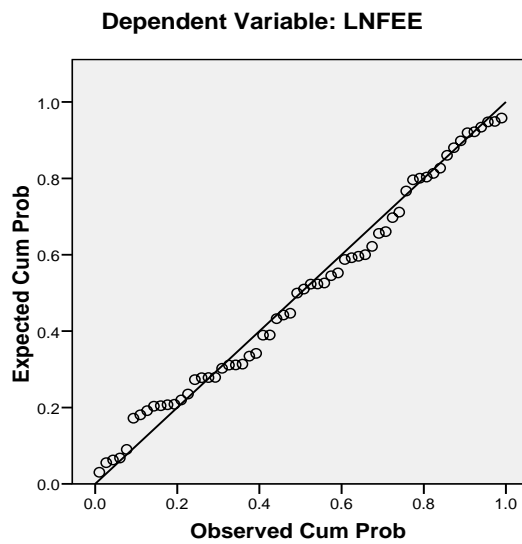
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNFEED	60	19.022217	28.476889	22.22775136	1.648000774
BoardInd	60	1	5	1.92	1.078
BoardSize	60	3	10	4.93	2.154
BoardMeet	60	2	12	5.15	2.049
ACInd	60	1	2	1.03	.181
ASize	60	3	4	3.15	.360
ACMeet	60	2	13	5.97	2.923
LNASSETS	60	20.280589	32.022255	28.50737919	1.749518367
SUBS	60	1.000000	4.790000	2.50716667	1.110739701
LEV	60	.000070	.715402	.15817170	.169990612
ROA	60	-.197159	.154651	.06309472	.058476926
REC	60	.012021	.518900	.19610510	.105759975
INV	60	.036530	.525306	.18412265	.103346446
BIG4	60	0	1	.80	.403
Valid N (listwise)	60				

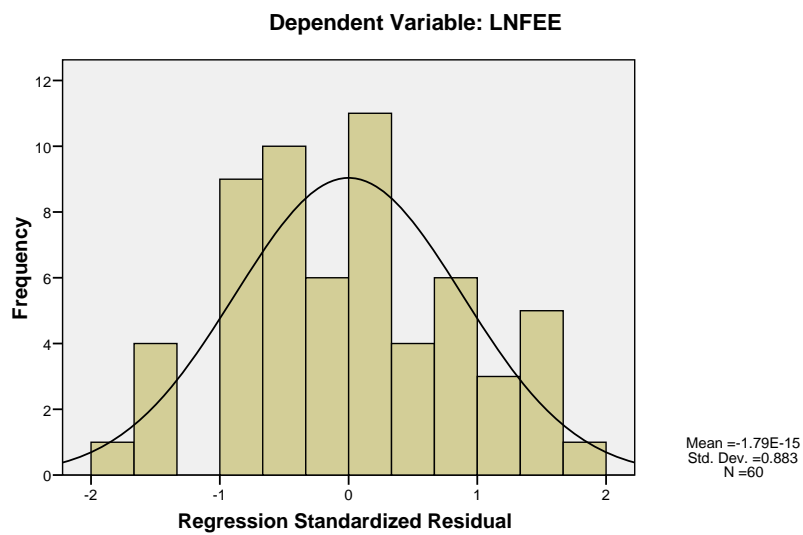
LAMPIRAN C

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,71073342
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		,602
Asymp. Sig. (2-tailed)		,862

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN D

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.762	2.888		3.380	.001		
BoardInd	.495	.240	.327	2.058	.045	.160	6.252
BoardSize	.015	.141	.018	.105	.917	.131	7.605
BoardMeet	-.063	.055	-.080	-1.135	.262	.816	1.225
ACInd	1.048	.516	.140	2.032	.048	.855	1.169
ACSize	.624	.351	.136	1.778	.082	.687	1.456
ACMeet	-.001	.031	-.003	-.044	.965	.801	1.249
LNAsset	.302	.103	.321	2.933	.005	.337	2.964
SUBS	.049	.027	.183	1.844	.072	.410	2.439
LEV	-1.122	.945	-.116	-1.187	.241	.426	2.349
ROA	-4.842	2.560	-.169	-1.891	.065	.505	1.981
REC	-1.935	1.214	-.124	-1.594	.118	.666	1.501
INV	-.174	1.390	-.011	-.125	.901	.532	1.879
BIG4	.752	.307	.184	2.449	.018	.716	1.398

a. Dependent Variable: LNFEE

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	BoardInd	,160	6,252
	BoardSize	,131	7,605
	BoardMeet	,816	1,225
	ACInd	,855	1,169
	ACSize	,687	1,456
	ACMeet	,801	1,249
	LNAsset	,337	2,964
	SUBS	,410	2,439
	LEV	,426	2,349
	ROA	,505	1,981
	REC	,666	1,501
	INV	,532	1,879
	BIG4	,716	1,398

a. Dependent Variable: LNFEE

Collinearity Diagnostics^a

Mod Dimension		Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions													
				(Constant)	Board Index	Board Size	Board Meet	ACI Index	ACSI Index	ACM Meet	LNAs Set	SUBS	LE V	ROA	REC	IN V	BIG 4
1	1	11.349	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.802	3.762	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.14	.06	.01	.00
	3	.632	4.238	.00	.01	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.05	.03	.05	.03	.00
	4	.316	5.989	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.10	.00	.16	.06	.20	.06	.00	.01
	5	.270	6.486	.00	.00	.00	.03	.00	.00	.26	.00	.01	.04	.14	.01	.00	.15
	6	.183	7.875	.00	.00	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.02	.00	.00	.30	.20	.12
	7	.148	8.746	.00	.00	.00	.42	.00	.00	.38	.00	.03	.02	.02	.08	.00	.10
	8	.122	9.651	.00	.03	.02	.14	.02	.00	.20	.00	.20	.00	.10	.02	.00	.11
	9	.080	11.896	.00	.01	.01	.20	.00	.00	.01	.00	.25	.56	.24	.12	.10	.41
	10	.047	15.499	.00	.26	.00	.09	.16	.01	.01	.00	.11	.11	.00	.22	.20	.03
	11	.028	20.162	.00	.08	.07	.04	.76	.03	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.01
	12	.016	26.508	.00	.55	.68	.05	.04	.07	.00	.00	.00	.00	.01	.14	.00	.03
	13	.006	44.132	.04	.01	.07	.00	.02	.86	.03	.04	.05	.00	.11	.00	.00	.00
	14	.001	130.830	.95	.05	.14	.01	.00	.02	.00	.95	.11	.03	.06	.01	.10	.02

Collinearity Diagnostics^a

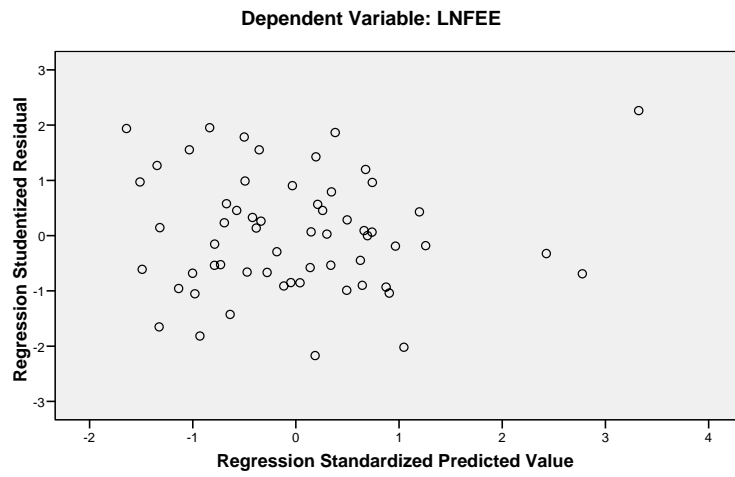
Mod Dimension		Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions													
				(Constant)	Boardload	BoardSize	BoardMeet	ACIend	ACSize	ACMeet	LNAsset	SUBS	LEV	ROA	RE C	IN V	BIG 4
1	1	11.349	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.802	3.762	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.14	.06	.01	.00
	3	.632	4.238	.00	.01	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.05	.03	.05	.03	.00
	4	.316	5.989	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.10	.00	.00	.16	.06	.20	.06	.00
	5	.270	6.486	.00	.00	.00	.03	.00	.00	.26	.00	.00	.01	.04	.14	.01	.00
	6	.183	7.875	.00	.00	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00	.00	.30	.20
	7	.148	8.746	.00	.00	.00	.42	.00	.00	.38	.00	.00	.03	.02	.02	.08	.00
	8	.122	9.651	.00	.03	.02	.14	.02	.00	.20	.00	.00	.20	.00	.10	.02	.00
	9	.080	11.896	.00	.01	.01	.20	.00	.00	.01	.00	.00	.25	.56	.24	.12	.10
	10	.047	15.499	.00	.26	.00	.09	.16	.01	.01	.00	.00	.11	.11	.00	.22	.20
	11	.028	20.162	.00	.08	.07	.04	.76	.03	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	12	.016	26.508	.00	.55	.68	.05	.04	.07	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.14	.00
	13	.006	44.132	.04	.01	.07	.00	.02	.86	.03	.04	.05	.00	.11	.00	.00	.00
	14	.001	130.830	.95	.05	.14	.01	.00	.02	.00	.95	.11	.03	.06	.01	.10	.02

a. Dependent Variable: LNFEED

LAMPIRAN E

Hasil Uji Heterokedastisitas

Scatterplot



LAMPIRAN F

Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,00998
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	24
Z	-1,823
Asymp. Sig. (2-tailed)	,068

a. Median

LAMPIRAN G

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,902 ^a	,814	,761	*****

a. Predictors: (Constant), BIG4, REC, ROA, ACInd, BoardMeet, ACMeet, INV, SUBS, ACSIZE, LEV, LNAsset, BoardInd, BoardSize

b. Dependent Variable: LNFEED

LAMPIRAN H

Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	130,435	13	10,033	15,486	,000 ^a
	Residual	29,803	46	,648		
	Total	160,238	59			

a. Predictors: (Constant), BIG4, REC, ROA, ACInd, BoardMeet, ACMeet, INV, SUBS, ACSIZE, LEV, LNAsset, BoardInd, BoardSize

b. Dependent Variable: LNFEE

LAMPIRAN I

Hasil Uji Statistik t (Partial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,762	2,888		3,380	,001
BoardInd	,495	,240	,327	2,058	,045
BoardSize	,015	,141	,018	,105	,917
BoardMeet	-,063	,055	-,080	-1,135	,262
ACInd	1,048	,516	,140	2,032	,048
ACSize	,624	,351	,136	1,778	,082
ACMeet	-,001	,031	-,003	-,044	,965
LNAsset	,302	,103	,321	2,933	,005
SUBS	,049	,027	,183	1,844	,072
LEV	-1,122	,945	-,116	-1,187	,241
ROA	-4,842	2,560	-,169	-1,891	,065
REC	-1,935	1,214	-,124	-1,594	,118
INV	-,174	1,390	-,011	-,125	,901
BIG4	,752	,307	,184	2,449	,018

a. Dependent Variable: LNFEF